

BAB II

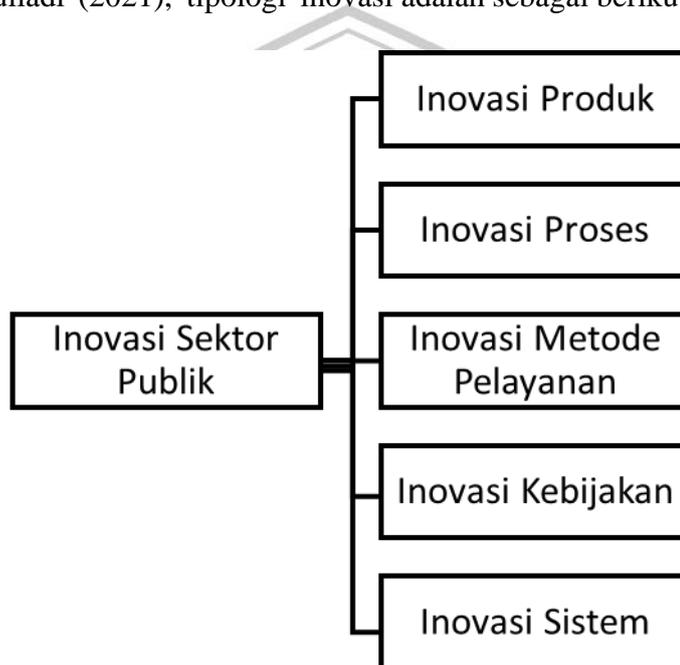
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Inovasi

Menurut (Kurniawan, 2017), suatu gagasan, fenomena, atau teknik yang dapat dirasakan atau dilihat sebagai suatu aspek yang asing bagi sekelompok orang atau individu merupakan definisi dari inovasi. Bentuk inovasi dapat berupa hasil temuan yang sangat baru maupun temuan yang telah ditemukan sebelumnya. Sebelumnya, produksi inovasi memiliki tujuan tertentu: menjawab suatu permasalahan tertentu.

Inovasi pelayanan publik semakin menjadi kebutuhan bagi penyedia layanan, baik di pemerintah pusat maupun daerah (Hartomi et al., 2018). Inovasi layanan tidak hanya mencakup peningkatan layanan tetapi juga pengembangan layanan baru, seperti yang disediakan oleh pemerintah. Inovasi di sektor publik digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Inovasi di sektor publik merupakan sarana untuk memecahkan tantangan saat ini. Oleh karena itu, inovasi merupakan suatu konsep, metode, atau prosedur yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu perubahan, khususnya dalam pelayanan yang diberikan oleh sektor publik. Sementara itu, inovasi sosial kini menjadi sangat penting bagi sektor publik untuk dapat menawarkan layanan kepada publik yang menjelaskan ketersediaan alternatif layanan masyarakat dan mengembangkan pendekatan berbeda yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, inovasi digunakan dan dimanfaatkan dalam kerangka komunitas, yaitu untuk mengidentifikasi solusi baru terhadap permasalahan yang sampai sekarang belum tereksplorasi dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan dengan cara yang baru.

Menurut Albury dan Mulgran dalam (Solong & Muliadi, 2021), suatu inovasi dianggap berhasil jika penemuan atau penggunaan suatu proses, produk, layanan, atau teknik pemberian layanan baru mengarah pada kemajuan sejati dalam hal kemandirian, efisiensi, atau kualitas keluaran. Tipologi inovasi merupakan penggolongan inovasi berdasarkan macam atau jenisnya. Menurut Solong & Muliadi (2021), tipologi inovasi adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Tipologi Inovasi Sektor Publik

Sumber: Data diolah peneliti

Sejumlah faktor penting tambahan perlu dipertimbangkan dalam bidang penelitian inovasi. Salah satu faktor tersebut adalah ambang batas inovasi, yang menggambarkan batas pengaruh atau keunggulan yang ditawarkan oleh penemuan-penemuan saat ini. Berikut beberapa ambang batas inovasi yang dijelaskan (Efendi et al., 2022): Inovasi inkremental adalah jenis yang pertama; inovasilah yang muncul dan mengubah layanan atau praktik yang ada dengan sedikit cara. Pada titik ini, inovasi biasanya menghasilkan modifikasi pada hubungan dalam struktur organisasi. Menurut (Tresiana, 2021), inovasi

inkremental berpeluang besar membantu sektor publik secara keseluruhan karena dapat meningkatkan jumlah uang (nilai) yang dapat ditukar dengan uang dan melakukan perubahan kecil yang dapat dilaksanakan dengan cepat dan tegas. *Kedua*, menurut (Wibowo & Pratomo, 2021) inovasi radikal adalah penggunaan teknik-teknik baru dalam operasional organisasi atau pelayanan atau perubahan mendasar dalam pelayanan publik. Selain itu, fakta bahwa bantuan diperlukan untuk membuat perubahan yang berarti pada proses pelayanan publik dan untuk memenuhi permintaan konsumen layanan yang telah lama diabaikan menjelaskan mengapa inovasi ini juga sangat jarang diterapkan (Nurlukman et al., 2023). Ketiga, inovasi sistemik atau transformasional, yaitu kapasitas untuk melakukan modifikasi pada tingkat struktural kinerja dan organisasi dengan secara radikal mengubah hubungan organisasi dan seluruh sektor. Dalam hal ini, penyesuaian sosial dan budaya yang mendasar diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada yang berpendapat bahwa pengembangan penemuan ini membutuhkan waktu cukup lama (Nurlukman et al., 2023).

Inovasi harus dipandang mempunyai potensi untuk menghasilkan beberapa keuntungan dari berbagai sudut. Ada lima faktor terkait inovasi yang mungkin mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu ide diterima. Menurut Rogers dalam (Lestari et al., 2021), inovasi memiliki beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Keuntungan Relatif, dengan kata lain, semuanya bergantung pada seberapa besar penerima manfaat dari penemuan tersebut. Inovasi harus melampaui inovasi masa lalu dalam hal kualitas dan efektivitas.

2. Kesesuaian, sebuah penemuan tidak bisa digantikan begitu saja; ia juga harus memiliki kualitas yang sesuai atau sesuai dengan inovasi yang digantikannya. Proses penciptaan inovasi baru mencakup penggunaan penemuan yang sudah ada sebelumnya.
3. Kerumitan, yakni tingkat kompleksitas suatu inovasi mungkin cenderung lebih tinggi dibandingkan inovasi-inovasi sebelumnya namun, tingkat upaya ini biasanya bukan merupakan masalah yang sangat berguna, karena inovasi biasanya memberikan metode yang lebih baik dan terkini.
4. Kemungkinan Dicoba, yaitu artinya, suatu inovasi diuji dan diterima hanya ketika inovasi tersebut terbukti memiliki manfaat atau cakupan yang lebih besar dibandingkan inovasi yang telah ada.
5. Dapat Diamati, artinya Inovasi perlu dilihat baik dari segi cara kerjanya maupun dalam hal menciptakan sesuatu yang sangat positif.

Berdasarkan pendapat Rogers dalam (Lestari et al., 2021), Proses inovasi pada sebuah organisasi tidak dapat disamakan dengan individu, yang perlu melewati sejumlah tahapan, diantaranya:

1. Perintisan (Initiation)

Fase ini terdiri dari fase perbandingan agenda dan fase penetapan. Tahap ini merupakan langkah awal untuk menyadari situasi dan memahami permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Fase penetapan agenda mencakup langkah-langkah untuk menentukan dan mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan. (Tui et al., 2022). Selanjutnya, dilihat pada konteks organisasi dan diputuskan di mana akan menerapkan inovasi tersebut. Fase ini biasanya memakan waktu yang sangat lama. Diketahui

bahwa terdapat kesenjangan dalam pekerjaan dan kinerja pada tahap ini. (Cen, 2022). (Mirnasari, 2013) mengutarakan bahwasanya kinerja yang memiliki kesenjangan tersebut yang dapat memberikan dorongan prosedur mencari inovasi pada suatu organisasi. Tahap selanjutnya adalah penyesuaian atau penyelarasan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan dan dilakukan koreksi atau penyesuaian melalui inovasi yang diadopsi. Fase-fase ini dilakukan untuk memastikan inovasi yang tepat ketika menerapkan inovasi tersebut dalam suatu organisasi.

2. Pelaksanaan (Implementation)

Saat ini, para inovator telah menetapkan pedoman untuk mengidentifikasi dan menerima penemuan-penemuan bermanfaat yang dapat mengatasi permasalahan dalam organisasi. Fase redefinisi, rutinisasi, dan kejelasan membentuk tahap implementasi (Lestari et al., 2021). Pada tahap definisi, semua inovasi yang diadopsi dibebaskan dari fungsi eksternal. Inovasi melalui proses reinvention dan cenderung ke arah kegiatan yang memperhatikan kepentingan organisasi. Fase ini melambangkan transformasi organisasi dan inovasi, yang masing-masing tidak hanya mendefinisikan ulang dirinya sendiri, namun juga memungkinkan mereka untuk berhubungan satu sama lain. (Atthahara, 2018).

Secara umum, setidaknya ada perubahan struktural dalam organisasi dan kepemimpinan komunitas ini. Fase klarifikasi merupakan peristiwa dimana inovasi menyebar di dalam organisasi dan mempengaruhi kinerja sehari-hari

seluruh komponen organisasi (Supriyanto, 2016). Karena fase klarifikasi ini mempengaruhi keseluruhan budaya organisasi, memerlukan waktu yang lama dan banyak perusahaan yang gagal melaksanakan langkah-langkah implementasi dengan sangat cepat, sehingga menimbulkan masalah produktif karena terlalu banyak hambatan. Fase fertilisasi merupakan fase dimana inovasi dianggap sebagai bagian dari masyarakat. Inovasi telah menjadi bagian rutin dari aktivitas organisasi dan tidak dikarakterisasi ulang sebagai material atau teknologi terkini. (Aziz et al., 2021).

Perkembangan zaman yang beriringan dengan semakin berkembangnya teknologi mengharuskan manusia dalam segala aspek untuk berinovasi. Inovasi seyogyanya, membawa perubahan dalam cara kita berpikir, bekerja, dan berinteraksi dengan cara mengembangkan gagasan baru, teknologi, atau pendekatan yang belum pernah ada sebelumnya. Sehingga, salah satu fungsi utama inovasi adalah menemukan solusi kreatif dan efektif untuk masalah yang ada.

2.2 E-Government

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas dan keterbukaan mengenai informasi keuangan pemerintah dan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, e-Government bertitik fokus terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui optimalisasi TIK. E-Government dapat digunakan di seluruh cabang pemerintahan untuk meningkatkan produktivitas internal, menawarkan layanan publik, ataupun memperkenalkan prosedur pemerintahan yang demokratis (Congge et al., 2020).

Sementara itu, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menawarkan definisi yang lebih ringkas mengenai e-Government: “E-Government merujuk pada penggunaan teknologi informasi (seperti Wide Area Networks, Internet, dan mobile computing) oleh organisasi-organisasi pemerintah. untuk memungkinkan mereka membangun hubungan dengan warga negara, dunia usaha, dan Organisasi Pemerintah lainnya.” “E-Government merupakan penerapan ICT oleh instansi pemerintah.”

Penjabaran lainnya dituangkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan, yang menjabarkannya sebagai wujud reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengubah sistem pemerintahan dengan turut berkolaborasi dengan penduduk pada saat pembentukan sebuah payung hukum (Wa Hesty, Muhammad Rozikin, 2020). Intinya, setiap reformasi atau modifikasi yang dilakukan pemerintah harus menghasilkan perbaikan tata kelola pemerintahan.

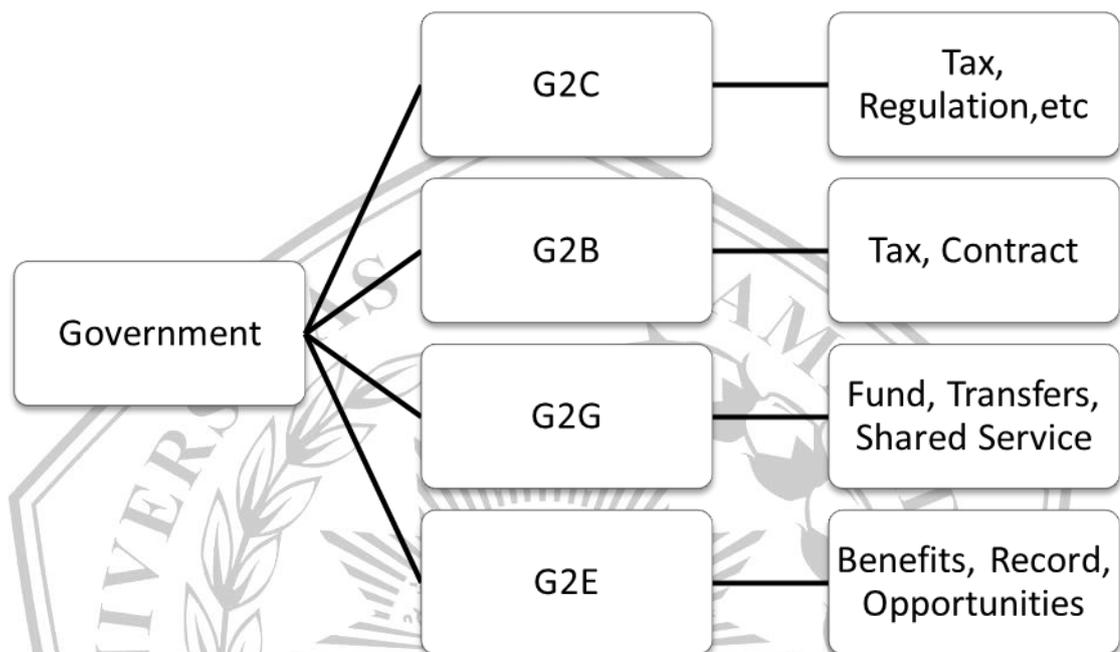
E-Government diharapkan dapat memberikan pelayanan publik dan tata kelola yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan, serta mengoptimalkan manfaat bagi lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, (Martins et al., 2017) mengkaji keuntungan-keuntungan berikut dari e-Government:

1. Berusaha mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan meningkatkan tingkat tanggung jawab, keterbukaan, dan kendali dalam operasional pemerintahan
2. Meningkatkan standar pelayanan pemerintah kepada pemangku kepentingan (dunia usaha, industri, dan masyarakat), dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi pada berbagai bidang kegiatan negara yang memerlukan perbaikan.

3. Menurunkan biaya administrasi yang ditanggung oleh pemangku kepentingan dan pemerintah untuk mencapai kebutuhan operasional dasar.
4. Mempercepat pemrosesan beragam permintaan dan meningkatkan ketepatan badan publik dalam menjawab pertanyaan dan permintaan warga.
5. Mampu memberikan pelayanan kepada seluruh tingkat lembaga pemerintah departemen dan non departemen (LPND).
6. Memberikan bantuan terhadap perekonomian regional dan nasional.
7. Memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan sumber pendapatan baru.
8. Kemampuan berkomunikasi secara bebas dan tanpa rasa takut atau cemas saat memberikan saran.
9. Menciptakan suasana komunitas yang mampu menangani permasalahan apa pun yang mungkin muncul sebagai respons terhadap perubahan pola internasional.
10. Pemberdayaan demokratis terhadap aktor lain dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam perumusan kebijakan publik

(Firdaus & Wafa, 2021) menjelaskan bahwa pertumbuhan e-Government di setiap institusi terutama dipengaruhi oleh tanggung jawab dan tugas utama masing-masing institusi, jenis sumber informasi yang digunakan, dan layanan yang ditawarkan. Hal ini menetapkan prosedur bisnis dan struktur data yang berfungsi sebagai landasan bagi perencanaan induk e-Government di setiap organisasi. Prioritas pengembangan e-Government ditentukan oleh jenis informasi yang dibutuhkan dan layanan yang ditawarkan dari perspektif pemerintah-ke-pemerintah (G2G), pemerintah-ke-bisnis (G2B), dan pemerintah-

ke-warga negara (G2C). . Hubungan Pegawai-Pemerintah (G2E). Hubungan bisnis-ke-bisnis, bisnis-ke-pelanggan, dan pelanggan-ke-bisnis juga terhubung dengan gagasan e-Government. Gambaran jangkauan dan gagasan e-Government adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Konsep E-GOV

Sumber: data diolah peneliti

1. Government to Citizens

Jenis kolaborasi pemerintah yang paling umum dilakukan adalah G-to-C, yang mana pemerintah mengembangkan dan menerapkan serangkaian inisiatif TI dengan maksud peningkatan kolaborasi dengan khalayak umum. Atau dapat dikatakan, sebagai upaya untuk masyarakat lebih mudah mengakses pemerintah untuk berbagai kebutuhan layanan sehari-hari dengan mendekatkan pemerintah kepada mereka melalui berbagai jalur akses (Pande Putu Regina Maharani, Tedi Erviantono, 2020).

2. Government to Business

Membangun suasana ramah dunia usaha merupakan salah satu tugas utama pemerintah guna menjamin kelancaran perekonomian bangsa. Untuk menjalankan operasional sehari-hari, perusahaan swasta dan bisnis lainnya memerlukan sejumlah besar data dan informasi yang disimpan oleh pemerintah. Pemangku kepentingan juga harus berkomunikasi dengan berbagai lembaga pemerintah mengenai hak dan tanggung jawab yang dimiliki organisasi sebagai sebuah bisnis. Tujuan dari menjalin hubungan positif antara sektor publik dan swasta tidak hanya terbatas pada membantu pengusaha mengelola usahanya; Memiliki hubungan pertukaran yang kuat dan produktif dengan sektor swasta akan memungkinkan sektor publik mencapai lebih banyak hal dan memperoleh manfaat (Pande Putu Regina Maharani, Tedi Erviantono, 2020).

3. Government to Government

Globalisasi telah membuktikan bahwa komunikasi sehari-hari antar semua negara harus meningkat. Komunikasi sehari-hari antar pemerintah sangat penting untuk menangani permasalahan terkait, tidak hanya dalam urusan luar negeri tetapi juga dalam kolaborasi dan koordinasi internasional antar lembaga pemerintah (bisnis, industri, masyarakat, dll.). melalui perdagangan. Kami juga memerlukan kolaborasi. memfasilitasi mekanisme interaksi sosial dan budaya, prosedur politik dan administrasi, dan sebagainya (Pande Putu Regina Maharani, Tedi Erviantono, 2020). Implementasi dari teori tersebut, berupa:

- a. Ada ikatan administratif antara beberapa kedutaan dan konsulat serta pemerintah daerah, yang membantu menyediakan data dan informasi yang benar yang diinginkan pengunjung di negara asal mereka.
- b. Sebuah sistem informasi hak cipta intelektual dalam upaya menilai serta mendaftarkan sebuah temuan.

4. Government to Employees

(Pande Putu Regina Maharani, Tedi Erviantono, 2020) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai pemerintah negara bagian dan federal yang memberikan layanan publik di berbagai institusi, aplikasi e- Government juga diperlukan. Format G-to-E ini memungkinkan pembuatan beberapa aplikasi, seperti:

- a. Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah dimaksudkan untuk memudahkan tata cara mutasi, rotasi, dan demosi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Program asuransi kesehatan dan pendidikan terpadu bagi pejabat publik yang tersedia di fasilitas pendidikan dan kesehatan (sekolah, universitas, perguruan tinggi, apotek, dll.).

Harapan bahwa peningkatan terhadap kualitas serta kuantitas pelayanan yang disediakan disetiap waktunya, menjadi alasan perlunya penerapan e-Government di seluruh bagian pelayanan publik. . E-Government juga diharapkan menghasilkan penghematan biaya, misalnya dengan menurunkan biaya administrasi melalui platform online. Selain itu, masyarakat juga dapat dengan mudah memahami sejauh mana aktivitas pemerintah yang mengedepankan akuntabilitas dan keterbukaan.

2.3 Simpeg Plus

Inovasi berbasis teknologi adalah salah satu cara pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada publik, sektor swasta, dan pemerintah itu sendiri (Aullia Reza Utami & Nurhadianto, 2017). Saat ini sudah banyak inovasi yang dikeluarkan baik di tingkat pusat maupun daerah. BKPSDM yang berlokasi di Kota Sumenep, Madura, adalah contohnya. Tugas utama dari BKPSDM sendiri menangani tata kelola dari para pegawai Pemda. [Http://bkpsdm.sumenep.go.id](http://bkpsdm.sumenep.go.id) merupakan website yang dibangun dan didirikan BKPSDM. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian merupakan salah satu fitur yang ditawarkan BKPSDM Kabupaten Sumenep yang memungkinkan masyarakat umum dan pegawai dapat mengunjungi alamat internet (Aullia Reza Utami & Nurhadianto, 2017).

Tanggung jawab utama BKPSDM Kabupaten Sumenep berupa pelaksanaan urusan pemerintah sesuai dengan tingkatannya termasuk dalam hal tata kelola serta optimalisasi pegawai. Website <http://bkpsdm.sumenep.go.id> dirancang dan dibangun oleh BKPSDM Kabupaten Sumenep. SIMPEG Plus menjadi bentuk dari fitur yang ditawarkan BKPSDM Kabupaten Sumenep yang memungkinkan masyarakat umum maupun pekerja dapat mengunjungi alamat internet. SIMPEG diperkenalkan oleh BKPSDM Kabupaten Sumenep sebagai sarana optimalisasi sistem informasi manajemen.

Melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, SIMPEG dimaksudkan sebagai media percepatan pelayanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 dan diperkuat dengan peranturan BKN Nomor 4 tahun 2023. Mengelola data kepegawaian

melalui penggunaan PIS untuk memungkinkan prosedur administrasi yang menyeluruh, cepat, dan akurat (Sadat, 2019). Sistem yang lengkap meliputi sumber daya manusia, proses, prosedur kerja, pengolahan data, pengumpulan data pegawai, dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan komprehensif untuk mendukung administrasi kepegawaian.

Secara umum SIMPEG merupakan penemuan BKPSDM Kota Sumenep yang memberikan kemudahan bagi personel berupa:

1. Sinkronisasi data kepegawaian

Program SIASN dan SIMPEG Plus menggunakan dua metode sinkronisasi data yang berbeda: simplex dan duplex. Data simpleks hanya dapat diambil dari SIASN, sedangkan SIMPEG Plus meminta data dari SIASN untuk melakukan dupleks pada aplikasi SIMPEG Plus sebelum menambahkan data ke aplikasi SIASN. Data historis dan primer keduanya dapat disinkronkan menggunakan SIASN. Data harus diminta dari SIASN untuk melakukan sinkronisasi Simplex, dan kemudian disimpan dalam program SIMPEG Plus. Sama halnya dengan data historis lainnya, sinkronisasi di SIMPEG Plus ini dapat dilakukan melalui menu Profil dan submenunya. Namun yang dimasukkan hanya data jabatan, mata kuliah, pelatihan, dan SKP; data model Duplex yang dimasukkan pada program SIMPEG Plus juga akan dimasukkan ke dalam aplikasi SIASN. Kekhususan informasi yang dimasukkan ke dalam SIMPEG adalah:

- a. Informasi tentang riwayat hidup
- b. Berkembangnya pendidikan baik formal maupun informal
- c. Sejarah kedudukan dan pangkat

- c. Penghargaan, penghargaan, atau penghargaan atas jasa masa lalu
- d. Sejarah pengalaman organisasi
- e. Riwayat pembayaran
- f. Pendidikan dan pelatihan yang lalu
- g. Daftar penilaian prestasi kerja
- h. Keputusan
- i. Kecakapan.

Lebih lanjut (Selfia et al., 2022) menjelaskan bahwa, sistem informasi manajemen personalia terdiri dari orang (brainware), data, proses organisasi, dan sejumlah media lainnya dengan tujuan menawarkan data dan informasi tepat waktu kepada pemangkukepentingan internal, serta organisasi eksternal.

2.4 Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian-penelitian sebelumnya, yang akan penulis bandingkan dan analisis, tidak akan pernah terpisah dari penelitian kali ini. Kajian penulis sebelumnya akan berkaitan dengan inovasi layanan berbasis aplikasi. Mengenai perbandingan hasil penelitian penulis dengan hasil penelitian peneliti lain guna menunjang keabsahan, berupa:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian
(Sadat, 2019)	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara.	menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder Data primer diperoleh melalui wawancara	pada penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dimana penelitian sebelumnya hanya mengukur dengan dua	Pada penelitian terdapat kesamaan berupa mengkaji implementasi SIMPEG menggunakan dimensi SDM dan	Meskipun penerapan Simpeg di Pelayanan Kesehatan telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan baik dari segi prasarana dan sarana sistem informasi serta ketersediaan sumber daya manusia yang terampil. Temuan dari
		dan observasi. data sekunder didapatkan dari literature atau dokumen berupa hasil penelitian dan artikel terkait.	dimensi, yaitu sumber daya manusia dan pelaksanaan prosedur	pelaksanaan prosedur	observasi penelitian dan wawancara yang dilakukan menjadi bukti akan hal ini.
(Kamal & Basri, 2020)	Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder Data primer diperoleh melalui	Penelitian sebelumnya ditinjau dari 5 dimensi yaitu: 1. Perangkat Keras. 2. Perangkat lunak. 3.	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam menganalisis implementasi melalui	Di BKDPSDM Kabupaten Bombana, strategi SIMPEG sudah sering diterapkan pada lima aspek, yaitu: 1. Basis Data; 2. Perangkat Lunak; 3. Perangkat keras 4. Sistem Jaringan
	n Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bombana	wawancara dan observasi. data sekunder didapatkan dari literature atau dokumen berupa hasil penelitian dan artikel terkait	Database. 4. Sistem Jaringan Komputer. 5. Sumber daya	aspek SDM.	Komputer 1. 5. Bahan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian
(Athin Pratiwi, 2018)	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan	menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder Data primer diperoleh	Terdapat perbedaan teori dengan analisis penelitian kali ini. Hal ini di buktikan	Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu sama sama mengkaji	Dalam prosedur kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan bidang masing-masing dan sudah dilaksanakan sesuai arahan atau tupoksi. Prosedur kontrol dilakukan dengan user akun, dimana user akun
	Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bkdiklatda Kota Salatiga	melalui wawancara dan observasi. data sekunder didapatkan dari literature atau dokumen berupa hasil penelitian dan artikel terkait.	dengan hasil jurnal penelitian tersebut bahwa dalam pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh BKDiklatda Kota Salatiga meliputi 2 prosedur yaitu prosedur kerja dan prosedur kontrol.	implementasi SIMPEG berdasarkan prosedur yang merupakan bagian dari kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi dan karakteristik implementor	ini akan membatasi kewenangan masing-masing bidang. Hal ini diterapkan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun persyaratan personel pengguna SIMPEG masih kurang, namun penerapan SIMPEG di BKDiklatda Kota Salatiga telah berjalan dengan baik. Pemerintah dapat membantu penyediaan data kepegawaian yang cepat, akurat, dan efisien dengan menggunakan SIMPEG.